

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang selanjutnya disebut TELKOM, merupakan perusahaan penyedia layanan telepon tidak bergerak terkemuka di Indonesia. Sementara itu, anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai TELKOM, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), merupakan perusahaan operator layanan telepon seluler terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan beragam layanan telekomunikasi lainnya, termasuk interkoneksi, jaringan, data, internet, dan lain-lain.

Sejarah TELKOM berawal pada tahun 1856, saat pengoprasian telegraf elektromagnetik pertama di Indonesia yang menghubungkan antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor) oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Hingga pada tahun 1965, pemerintah memutuskan pemisahan layanan pos dan telekomunikasi ke dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua perusahaan, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) sebagai penyedia layanan telekomunikasi domestik dan internasional serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia (“PT INTI”) sebagai pembuat perangkat telekomunikasi. Selanjutnya pada 1991, Perumtel mengalami perubahan status, menjadi perseroan terbatas milik negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, atau TELKOM.

Pada tanggal 14 Nopember 1995, Pemerintah melakukan penjualan saham TELKOM melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2007). Saham TELKOM juga tercatat di NYSE dan LSE dalam bentuk American Depositary Shares (“ADS”) dan ditawarkan pada publik di Bursa Efek Tokyo dalam bentuk Public Offering Without Listing.

Kemudian pada tahun 1999, industri telekomunikasi mengalami perubahan signifikan. Pemerintah mengeluarkan Undang–undang Telekomunikasi No. 36 (Undang-Undang Telekomunikasi) yang berlaku efektif pada bulan September 2000, yaitu pedoman yang mengatur reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi masuknya pemain baru dan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Reformasi ini kemudian menyebabkan dihapuskannya kepemilikan bersama TELKOM dan Indosat di sebagian besar perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2001, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif TELKOM sebagai satu-satunya penyelenggara layanan telepon tidak bergerak di Indonesia dan Indosat sebagai satu-satunya penyelenggara layanan Sambungan Langsung Internasional (“SLI”). Hak eksklusif TELKOM sebagai penyedia jasa sambungan telepon lokal maupun sambungan langsung jarak jauh internasional akhirnya dihapuskan pada bulan Agustus 2002 dan Agustus 2003.

Untuk memelihara dan mempertahankan pertumbuhan di lingkungan industri yang kompetitif, TELKOM bertransformasi dari perusahaan penyelenggara layanan informasi dan telekomunikasi (InfoComm) menjadi perusahaan TIME (Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment). New TELKOM telah diperkenalkan kepada publik pada tanggal 23 Oktober 2009 bertepatan dengan ulang tahun TELKOM ke-153 yang menghadirkan *tagline* baru ‘*the world in your hand*’ dan *positioning* baru ‘*Life Confident*’.

Visi dan Misi PT. Telekomunikasi Indonesia adalah:

Visi:

To become a leading Telecommunication, Information, Media, Edutainment, Services (“TIMES”) player in the region.

Misi:

1. Menyediakan layanan “*more for less*” TIMES.
2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

(www.telkom.co.id, 2013)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN didirikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pembangunan ekonomi. BUMN sebagai pelaku kegiatan ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kepengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional (www.bpkp.go.id, 2014). BUMN sebagai badan yang mengelola aset negara dan pelaksana program subsidi (PSO pemerintah) juga mempunyai kewajiban untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan dan negara, serta diharuskan untuk dapat mengelola risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan, mengingat dalam era globalisasi ini terjadi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. (www.bpk.go.id, 2014)

TELKOM merupakan BUMN yang bergerak di bidang informasi dan telekomunikasi. Pemerintah Republik Indonesia (RI) memiliki 52,47% dari keseluruhan saham TELKOM yang dikeluarkan dan beredar. Pemerintah juga memegang saham dwiwarna TELKOM, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal tertentu. Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang mempunyai 13 anak perusahaan dan ekspansi internasional, TELKOM pun dituntut agar dapat bersaing baik di dalam negeri dan pasar internasional. Tuntutan ini membuat TELKOM yang juga merupakan salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia dengan nilai kapitalisasi diperkirakan mencapai sekitar Rp190.512,0 miliar per 31 Desember 2009, untuk selalu melakukan upaya agar tercipta kinerja perusahaan yang baik dengan pengelolaan bisnis sesuai dengan standar internasional, berfokus pada optimalisasi keunggulan kompetitif perusahaan, serta membangun sinergi kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan. (www.telkom.co.id, 2009)

Dalam ajang Anugerah BUMN 2013 yang diselenggarakan oleh BUMN *Track* bersama PPM Manajemen sebagai ajang bagi BUMN untuk unjuk kinerja,

TELKOM secara korporasi berhasil memperoleh penghargaan untuk dua kategori, yakni “BUMN Infrastruktur Berdaya Saing Terbaik” dan “Implementasi *Good Corporate Governance* BUMN Terbuka Berdaya Saing Terbaik” (news.detik.com, 2013). Namun berdasarkan analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011, Forum Advokasi Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara yang korup, dan TELKOM menduduki peringkat pertama dengan potensi penyimpangan yang merugikan negara mencapai Rp 12 milyar dan US\$ 130 juta. (www.tempo.co, 2012)

Selama tahun 2004-2006, Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menemukan indikasi korupsi sekitar Rp 10,484 triliun di sejumlah BUMN. Temuan ini berdasarkan 57 kasus yang sudah terungkap, salah satunya adalah kasus korupsi proyek VoIP TELKOM dengan indikasi manipulasi pulsa yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar (www.antikorupsi.org, 2006). Kajian ICW juga mengungkapkan pada 2011 terdapat 34 kasus korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN dan BUMD dengan potensi kerugian negara Rp 733,27 miliar. Kemudian pada 2012 sebanyak 24 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 74,34 miliar. Sementara pada 2013 hingga bulan Juni, sudah tercatat ada 25 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp 600,495 miliar (www.suarapembaruan.com, 2013).

Dari 24 kasus yang ditemukan ICW pada tahun 2012 tersebut, termasuk di dalamnya adalah kasus dugaan penyelewengan dana oleh TELKOM pada proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI) Kementerian Kominfo RI yang sampai saat ini masih berjalan proses hukumnya oleh Tipikor Bareskrim Polri dan KPK (www.theglobal-review.com, 2012). Pada September 2013 lalu, TELKOM kembali tersandung kasus monopoli pengadaan *Electronic Point of Sales* (e-POS) di Bandara Soekarno Hatta bersama dengan PT. Angkasa Pura II. Kasus yang diduga sarat dengan praktek korupsi ini hingga saat ini masih ditangani oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). (www.jurnalparlemen.com, 2013)

Fraud atau kecurangan, merujuk pada penyajian yang salah atas suatu fakta yang dilakukan oleh suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan membohongi dan membuat pihak lain tersebut meyakini fakta yang merugikan. Kecurangan tersebut umumnya dilakukan dengan tiga skema, yaitu: (1) laporan keuangan tipuan, dimana aset atau pendapatan disajikan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya; (2) korupsi, yang terdiri dari: penyuapan, pemerasan, hadiah ilegal, dan benturan kepentingan; (3) penyalahgunaan aset, baik aset perusahaan dalam bentuk uang (*cash*) atau aset dalam bentuk lainnya (Hall, 2009:159-166).

Teori Keagenan sering kali digunakan untuk menjelaskan kecurangan. Hubungan keagenan ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu tugas (jasa), prinsipal mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi yang berbeda dalam tujuan (Ismail dan Prawironegoro, 2009:206). Teori Keagenan (Gudono, 2012:147-155) dibangun sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang muncul dalam hubungan antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dengan agen (manajemen dan karyawan). Teori ini memprediksi jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal, dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi *principal-agent problem* di mana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Jadi di dalam Teori Keagenan, para pelaku ekonomi diduga akan mementingkan dirinya sendiri, menyembunyikan kebenaran, menipu, dan melakukan kecurangan.

Gudono (2012:155) juga mengungkapkan bahwa ada dua solusi penting yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah keagenan, yaitu: *monitoring* terhadap perilaku agen dan sistem kompensasi yang tepat untuk memotivasi agen agar mau bertindak baik. Wilopo (2006) kemudian menegaskan, untuk mendapatkan hasil *monitoring* yang baik, maka diperlukan pengendalian intern yang efektif, karena permasalahan keagenan terjadi ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal, situasi ini disebut asimetri informasi.

Pengendalian intern merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Dimana sebuah perusahaan menggunakan pengendalian intern untuk mengarahkan operasi mereka, melindungi aktiva, dan mencegah penyalahgunaan sistem mereka (Warren, et.al., 2006: 235). Pertahanan pertama terhadap kecurangan adalah pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang komprehensif, diterapkan secara menyeluruh dan memonitor secara reguler aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga dan mendeteksi risiko kerugian akibat kecurangan. Seringkali, meskipun karyawan tahu penyelewengan/kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan kriminal, tapi tetap dilakukan salah satunya adalah karena lemahnya pengendalian intern (Susanto, 2008:93-94). Hasil penelitian Randa dan Meliana (2009), Pramudita (2013) dan Mustikasari (2013) menemukan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Namun penelitian Kusumastuti dan Meiranto (2012) menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Kompensasi (Ismail dan Prawironegoro, 2009:195) ialah berbagai bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada para pekerjanya atas waktu, pikiran serta tenaga yang telah dikontribusikannya. Beberapa kompensasi bersifat keuangan seperti kenaikan gaji, bonus, tunjangan sementara kompensasi lainnya bersifat psikologis dan sosial seperti promosi dan peningkatan tanggung jawab (Ismail dan Prawironegoro, 2009:202). Menurut Teori Wexley dan Yuki (2003:13) dalam Pramudita (2013), suatu kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai serta pekerjaan yang menjemukan dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja, dalam hal ini adalah pencurian aset perusahaan atau organisasi tersebut. Gudono (2012:149) mengungkapkan bahwa dalam teori keagenan, sistem kompensasi yang sesuai akan memotivasi agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga diharapkan dapat mengurangi kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian Randa dan Meliana (2009), Thoyibatun (2012), Pramudita (2013), dan Mustikasari (2013) menunjukkan

bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Namun hasil penelitian Wilopo (2006) dan Kusumastuti dan Meiranto (2012) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Asimetri informasi adalah situasi ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak (agen dan prinsipal) dan, sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut (Hendriksen dan Van Breda, 2008:222). Gudono (2012:147) menjelaskan bahwa teori keagenan memprediksi jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal, yang menunjukkan adanya situasi asimetri informasi, dan kepentingan kedua belah pihak berbeda, maka agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Dua contoh khas yang menyangkut asimetri informasi dalam teori keagenan adalah kekacauan moral (*moral hazard*) dan pilihan yang merugikan (*adverse selection*). Menurut Scott (2000) dalam Ujiyantho (2010) *adverse selection* adalah bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor dan pihak luar, sedangkan *moral hazard* adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham atau pihak lain (kreditur, investor dan pemerintah). Hasil penelitian Wilopo (2006), Randa dan Meliana (2009), dan Mustikasari (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Sedangkan menurut penelitian Kusumastuti dan Meiranto (2012) asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk menganalisa lebih jauh mengenai pengaruh efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi, dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk”**.

1.3 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk?
2. Bagaimana efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi berpengaruh secara simultan terhadap kecenderungan kecurangan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk?
3. Bagaimana efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi berpengaruh secara parsial:
 - a. Bagaimana efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk?
 - b. Bagaimana kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk?
 - c. Bagaimana asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi secara simultan terhadap kecenderungan kecurangan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi secara parsial:
 - a. Mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
 - b. Mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
 - c. Mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi pihak akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan, pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi auditor internal perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan dalam upaya untuk mengurangi kecenderungan kecurangan dan mencegah terjadinya kecurangan.
2. Bagi karyawan perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk membantu mengurangi kecenderungan kecurangan dan mencegah terjadinya kecurangan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian berisi tentang rangkuman teori yang berkaitan, menguraikan penelitian terdahulu

sebagai acuan peneliti, kerangka pemikiran teoritis yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian yang digunakan, tahapan penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini dan saran yang akan diberikan.